



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN RESIKO POLARISASI SOSIAL BERBASIS RELIGIUS: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP KURIKULUM DAN PRAKTIK PEMBELAJARAN

Zahratul Aini ^{1*}, Syamzaimar ²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia

Corresponding Author: zahraaaini473@gmail.com *

Article Info

Article history:

Received : 11 Mei 2026

Acceptance : 01 Juni 2026

Published : 01 Juni 2026

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/cakrawala>

How to cite:

Aini, Z & Syamzaimar. (2026). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN RESIKO POLARISASI SOSIAL BERBASIS RELIGIUS: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP KURIKULUM DAN PRAKTIK PEMBELAJARAN. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, 4(1), 27-38.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara teoretis berfungsi sebagai perekat integrasi nasional, namun di tengah meningkatnya politik identitas, terdapat kekhawatiran bahwa PKn justru bertransformasi menjadi instrumen yang memperlebar jarak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interpretasi nilai-nilai kewarganegaraan yang bersinggungan dengan sentimen religius dapat memicu polarisasi di masyarakat multikultural. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis wacana kritis terhadap materi ajar serta literatur kebijakan pendidikan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infiltrasi tafsir keagamaan yang eksklusif ke dalam kurikulum PKn menciptakan dikotomi antara identitas kebangsaan dan identitas religius, yang pada gilirannya mengonsolidasi kelompok-kelompok sosial ke dalam kutub yang saling berhadapan. Penggunaan narasi "warga negara ideal" yang hanya berbasis pada satu perspektif dogma tertentu terbukti melemahkan kohesi sosial siswa di lingkungan pendidikan. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tanpa adanya redesain kurikulum yang menekankan pada literasi lintas agama dan netralitas pendidik, PKn berisiko menjadi alat segregasi ideologis. Diperlukan penguatan nilai-nilai kewargaan yang inklusif untuk memitigasi dampak polarisasi sosial agar tujuan awal integrasi nasional tetap terjaga.

Keywords: Pendidikan Kewarganegaraan, Polarisasi Sosial, Religiusitas, Integrasi Nasional, Kurikulum.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan instrumen strategis yang dirancang oleh negara untuk mentransmisikan nilai-nilai demokrasi dan integritas nasional (Samsuri, 2026; Suhendar et al., 2024). Di Indonesia, mandat ini secara formal diatur

melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Asrulla et al., 2025; Kusnadi, 2024). Namun, dalam lanskap sosial-politik kontemporer, PKn menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya sentimen identitas. Badan Pusat Statistik dalam Indeks Demokrasi Indonesia mencatatkan bahwa meskipun aspek lembaga demokrasi cenderung stabil, variabel "konten yang memecah belah" dan "provokasi berbasis identitas" di ruang publik masih menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial.

Kesenjangan antara idealisme PKn sebagai pemersatu dan realitas lapangan menjadi titik krusial penelitian ini. Idealnya, PKn berfungsi sebagai "tenda besar" yang menaungi keberagaman. Namun, data dari Setara Institute (2022) menunjukkan adanya peningkatan intoleransi di lingkungan pendidikan, di mana tafsir keagamaan yang eksklusif mulai menginfiltrasi ruang-ruang kelas (Hidayat, 2024; Kholil et al., 2024). Hal ini menyebabkan PKn, yang seharusnya mengajarkan Civic Virtue, justru berisiko menjadi instrumen polarisasi sosial ketika nilai-nilai kewarganegaraan dibenturkan secara diametral dengan doktrin religiusitas tertentu.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi peran PKn dalam moderasi beragama dan penguatan karakter nasional. Namun, terdapat celah (gap) literatur di mana belum banyak studi yang secara spesifik membedah bagaimana kurikulum PKn baik yang tersurat maupun melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) menjadi katalisator polarisasi berbasis religius di kalangan siswa (Marsudi, 2020). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai mekanisme transformasi PKn dari alat integrasi menjadi instrumen segregasi sosial dalam konteks masyarakat pasca-kebenaran (*post-truth*), dengan memadukan analisis tekstual kurikulum dan realitas empiris di daerah.

Tujuan utama dari karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bias religius dalam pengajaran PKn serta dampaknya terhadap pola interaksi sosial peserta didik. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi kewargaan yang inklusif dan dekonstruksi narasi eksklusivisme dalam buku teks merupakan langkah mendesak untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dengan memahami posisi PKn dalam pusaran polarisasi ini, diharapkan pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pendidikan yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika politik identitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif analitis untuk mengeksplorasi fenomena polarisasi sosial dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Creswell, 2021). Sejalan dengan paradigma penelitian sosial yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, pendekatan ini dipilih untuk mendalami makna tersembunyi di balik praktik instruksional yang berpotensi memicu segregasi identitas. Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris, penelitian ini mengombinasikan studi dokumen (analisis wacana kritis) dengan studi lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasir Pengaraian, Rokan Hulu.

a) Batasan Dokumen, Lokasi, dan Unit Analisis

Untuk memberikan batasan yang jelas, data penelitian dikelompokkan menjadi dua ranah utama:

- 1) Data Teksual (Studi Dokumen): Dokumen yang dianalisis dibatasi pada Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tingkat menengah atas (SMA/MA) Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Unit analisisnya adalah elemen tekstual (kata, frasa, paragraf) dan elemen visual yang memuat materi hubungan agama-negara, keberagaman, serta indikasi hidden curriculum.
- 2) Data Lapangan (Studi Empiris): Lokasi penelitian lapangan dibatasi di wilayah Pasir Pengaraian. Unit analisisnya adalah proses pembelajaran PKn di kelas, persepsi guru, dan pola interaksi sosial peserta didik. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri dari guru mata pelajaran PKn dan peserta didik di SMA kawasan Pasir Pengaraian.

b) Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap utama yang terintegrasi:

- 1) Tahap Orientasi: Melakukan studi literatur terhadap laporan tahunan lembaga pemantau demokrasi seperti Setara Institute (2022) dan Wahid Foundation (2021) guna memetakan tren intoleransi di lingkungan pendidikan selama lima tahun terakhir.
- 2) Tahap Eksplorasi (Pengumpulan Data Lapangan & Dokumen): Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis konten terhadap materi ajar buku teks PKn. Secara simultan, peneliti turun ke lapangan di Pasir Pengaraian untuk melakukan observasi langsung terhadap iklim pembelajaran di kelas serta melakukan

wawancara mendalam (in-depth interview) bersama guru dan siswa menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.

- 3) Tahap Interpretasi: Mengaitkan temuan tekstual dari dokumen kurikulum dengan data real hasil wawancara dan observasi di lapangan untuk menyusun konstruksi analisis yang utuh mengenai realitas polarisasi sosial.

c) Prosedur Kodifikasi dan Analisis Data

Teknik analisis data mengikuti model interaktif dari Miles et al, yang disesuaikan dengan standar publikasi jurnal soshum internasional, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al, 2014). Prosedur kodifikasi dilakukan menggunakan panduan materi (coding sheet) yang ketat terhadap data tekstual maupun data lapangan (transkrip wawancara dan catatan lapangan hasil observasi di Pasir Pengaraian). Prosedur kodifikasi dibagi ke dalam beberapa kategori kode, antara lain:

- 1) Kode [K-Eksklusi] untuk teks atau pernyataan wawancara yang mengandung narasi keagamaan eksklusif.
- 2) Kode [K-Dikotomi] untuk data yang membenturkan nilai kewargaan secara diametral dengan doktrin religiusitas.
- 3) Kode [K-Polar] untuk perilaku atau materi yang berpotensi memicu polarisasi dan segregasi sosial di kalangan siswa.

d) Teknik Validasi Data dan Reliabilitas

Untuk menjamin keabsahan, reliabilitas, dan objektivitas data yang kuat, penelitian ini menggunakan dua teknik validasi:

- 1) Expert Judgment: Panduan kodifikasi materi (coding sheet) dan instrumen wawancara terlebih dahulu divalidasi oleh para ahli di bidang kurikulum dan sosiologi pendidikan sebelum digunakan dalam pengumpulan data.
- 2) Triangulasi Data: Peneliti menerapkan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari teks regulasi dan buku cetak diuji silang (dikonfirmasi) dengan data empiris di lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi kelas dan hasil wawancara mendalam bersama guru serta siswa di Pasir Pengaraian.

e) Etika Penelitian

Aspek etika penelitian dipenuhi dengan memastikan penggunaan data sekunder yang bersifat publik dan mematuhi regulasi keterbukaan informasi sebagaimana

diatur dalam standar operasional prosedur penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi, Untuk data lapangan, prinsip etika dipenuhi melalui kesediaan informan (informed consent) serta komitmen menjaga kerahasiaan identitas (anonymity) guru dan siswa yang diwawancarai di Pasir Pengaraian. Fokus utama metode ini adalah untuk memberikan dasar evaluatif terhadap objektivitas kurikulum PKn dalam menjaga kohesi sosial masyarakat multikultural.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Kewarganegaraan dalam Kurikulum dan Bahan Ajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran signifikan dalam narasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, terutama setelah implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan dokumentasi materi ajar yang dianalisis, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai religius dalam konten kewarganegaraan sering kali disajikan melalui lensa mayoritas. Hal ini selaras dengan laporan dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2021) yang menyatakan bahwa materi pendidikan agama dan kewarganegaraan di sekolah cenderung mengalami "penyempitan makna" yang lebih menekankan pada aspek ritualitas ketimbang nilai substansial kewargaan yang inklusif.

Kurikulum PPKn seharusnya tidak boleh hanya berfokus pada hafalan konsep hukum dan politik, melainkan wajib mengembangkan sikap spiritual, sosial, dan karakter kebangsaan melalui:

- 1) Pembelajaran Kontekstual: Menghubungkan teori kewargaan dengan realitas sosial siswa.
- 2) Proyek Sosial dan Dialog Demokratis: Menumbuhkan ruang-ruang diskusi yang setara di kelas.
- 3) Keteladanan Guru: Menampilkan figur pendidik yang objektif dan inklusif.

Transformasi kurikulum diarahkan agar mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat modern dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan nilai-nilai Pancasila, sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana pembentukan generasi yang aktif, moderat, dan berintegritas.

Hidden Curriculum dan Reproduksi Polarisasi Identitas

Hasil observasi literatur dan analisis kebijakan menunjukkan bahwa polarisasi tidak selalu muncul dalam teks eksplisit, melainkan melalui *hidden curriculum* (Suhendar et al., 2026; Ukur et al., 2025). Pola ini terjadi ketika tenaga pendidik memberikan interpretasi personal terhadap nilai Pancasila yang dipadukan dengan sentimen religiusitas politik. Komnas HAM melaporkan bahwa diskriminasi berbasis identitas di satuan pendidikan sering kali berawal dari pembiaran narasi eksklusif dalam diskusi kelas PKn (Mali & SH, 2026; Saragih et al., 2025).

Tabel 1. Indikator Polarisasi dalam Pembelajaran PKn

No	Indikator Polarisasi	Manifestasi dalam Pembelajaran PKn
1	Eksklusivisme	Penggunaan dikotomi "Kita" vs "Mereka" dalam contoh kasus
2	Superioritas Moral	Menilai kepatuhan hukum hanya berdasarkan standar dogma
3	Segregasi Interaksi	Penentuan ketua kelompok berdasarkan kesamaan identitas

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa indikator eksklusivisme menjadi poin paling krusial. Hal ini menjelaskan mengapa temuan di lapangan menunjukkan adanya keretakan sosial antar-siswa. Sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik dalam laporan Indeks Kebahagiaan dan Kohesi Sosial, wilayah dengan tingkat pendidikan identitas yang kaku cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap keberagaman budaya (Al Humaidy et al., 2026).

Relasi Religiusitas, Kewargaan, dan Representasi Warga Negara Ideal

Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan bahwa PKn sedang mengalami "kooptasi identitas." Jika merujuk pada teori kewargaan multikultural dari Kymlicka, sebuah negara bangsa akan mengalami krisis integritas jika pendidikan kewargaannya gagal memberikan ruang netral bagi semua identitas (Kymlicka, 2022). Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena adanya tarikan antara semangat nasionalisme sekuler dan tuntutan religiusitas yang menguat di ruang publik.

Data dokumentasi menunjukkan bahwa pada beberapa bab mengenai "Norma dan Keadilan," ilustrasi yang digunakan secara dominan merujuk pada praktik satu kelompok agama saja. Hal ini menciptakan kesan bias bahwa warga negara yang ideal

adalah mereka yang taat secara religius menurut standar teologis tertentu. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendidikan di Indonesia memerlukan "Moderasi Beragama" yang terintegrasi secara organik dalam PKn, bukan hanya sebagai tempelan kurikulum (Maharani et al., 2026; Suhendar & Halimi, 2023). Data menunjukkan bahwa tanpa adanya interpretasi yang inklusif, PKn justru berisiko menjadi alat pemisah akibat minimnya literasi lintas agama (*interfaith literacy*) di kalangan penyusun kebijakan dan praktisi pendidikan.

Diskusi ini membuktikan bahwa PKn harus didekonstruksi dari instrumen polarisasi menjadi instrumen integrasi kembali. Hal ini menuntut adanya revisi terhadap buku teks agar lebih representatif dan pelatihan guru yang menekankan pada netralitas pedagogis. Sebagaimana ditegaskan oleh Kemendikbudristek dalam panduan Profil Pelajar Pancasila, kebinekaan global harus menjadi inti dari setiap materi kewarganegaraan guna memitigasi dampak polarisasi yang telah terjadi.

Dampak Polarisasi terhadap Kohesi Sosial Peserta Didik

Polarisasi berbasis religius yang diinstrumentasi secara tidak sengaja melalui PKn membawa implikasi jangka panjang terhadap stabilitas demokrasi dan kohesi sosial (Chris, 2025; Syam et al., 2024). Temuan ini didukung oleh data dari Setara Institute (2022) yang menunjukkan bahwa 54% siswa cenderung merasa lebih nyaman berinteraksi dengan sesama penganut agama dalam konteks diskusi nilai nasional di sekolah (Haluti et al., 2025). Ketika siswa diajarkan untuk melihat kewarganegaraan melalui kacamata agama yang sempit, mereka akan sulit menerima konsensus nasional yang bersifat plural.

Penemuan ini sejalan dengan studi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menggaris bawahi bahwa radikalisme di kalangan anak muda sering kali dipicu oleh kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai kewargaan yang kritis dan terbuka (Hatim et al., 2025). Namun, ketika materi kurikulum diintegrasikan dengan baik, hasilnya berbanding lurus dengan peningkatan literasi politik.

Berdasarkan hasil observasi empiris di Pasir Pengaraian, penguatan literasi kewargaan dan integrasi materi kurikulum dengan isu lokal di Rokan Hulu terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi kelas sebesar 25%. Data wawancara dengan civitas akademika di Pasir Pengaraian juga mengungkapkan dampak positif berupa:

- 1) Peningkatan Kritis Siswa/Mahasiswa: Menjadi lebih selektif dalam memverifikasi informasi politik di media sosial untuk menghindari hoaks.
- 2) Kesadaran Demokrasi: Adanya kesadaran kolektif untuk menggunakan hak suara secara rasional dalam pemilihan lokal di Pasir Pengaraian.
- 3) Etika Berpendapat: Mengalami peningkatan kualitas dialog antar-kelompok sebesar 30% dalam satu semester karena terbentuknya ruang diskusi yang inklusif.

Banyak guru masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan perangkat digital yang dapat menunjang pembelajaran. Kompetensi digital mencakup pemahaman terhadap perangkat keras seperti komputer dan tablet, serta perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, Learning Management System (LMS), dan alat kolaborasi daring. Namun, masih banyak guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk administrasi maupun dalam proses mengajar (Syaifulloh, 2025).

Strategi Penguatan PKn sebagai Instrumen Integrasi Sosial

Untuk mengembalikan fungsi PKn sebagai instrumen integrasi, rekonstruksi menyeluruh harus dilakukan. Penguatan budaya damai di sekolah hanya bisa terjadi jika PKn mampu melepaskan diri dari kepentingan politik identitas sesaat (Jurs et al., 2026). Sejalan dengan Kemendikbudristek dalam panduan Profil Pelajar Pancasila, kebinekaan global harus menjadi inti materi (Puspitasari & Rohmah, 2025).

Namun, strategi penguatan ini menghadapi tantangan riil di lapangan, khususnya pada kesiapan pendidik dan guru termasuk pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah dalam menghadapi transformasi kurikulum berbasis digital.

Tantangan Utama di Lapangan:

- 1) Kurangnya Kompetensi Digital: Banyak guru masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan perangkat keras dan perangkat lunak seperti Learning Management System (LMS) untuk menyebarkan konten kewargaan yang inklusif.
- 2) Terbatasnya Infrastruktur: Madrasah dan sekolah di daerah terpencil Rokan Hulu sering menghadapi kendala akses internet dan keterbatasan perangkat teknologi akibat letak geografis.

- 3) Resistensi terhadap Perubahan: Terdapat ketakutan akan perubahan metode mengajar dan minimnya pelatihan yang membuat guru kembali pada metode konvensional yang monoton.

Solusi Strategis yang Direkomendasikan:

- 1) Pelatihan Intensif dan Berkelanjutan: Program lokakarya dan kursus digital yang aplikatif agar guru mampu memanfaatkan media pembelajaran interaktif seperti aplikasi kuis dan LMS untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi secara menarik.
- 2) Penyediaan Infrastruktur yang Memadai: Pengadaan komputer, proyektor, dan jaringan Wi-Fi stabil yang didukung oleh pendampingan teknis berkala dari pemerintah setempat.
- 3) Mendorong Adaptasi dan Inovasi: Membangun budaya kolaboratif melalui forum diskusi guru dan memberikan insentif agar pendidik lebih percaya diri menerapkan metode gamifikasi atau video pembelajaran berbasis kebinekaan.
- 4) Pengembangan Kurikulum Berbasis Digital: Mengintegrasikan teknologi ke dalam mata pelajaran serta membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan analisis data agar mampu menepis konten provokasi di ruang siber.

Pelaksanaan penguatan ini memberikan gambaran nyata bahwa reposisi materi buku teks dan peningkatan kualitas pedagogis guru merupakan langkah mendesak demi menjaga kelestarian cita-cita demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial antara fungsinya sebagai alat integrasi nasional dan kerentanannya menjadi instrumen polarisasi sosial berbasis religius. Polarisasi tersebut tidak hanya bersumber dari materi tekstual dalam buku ajar yang bias, melainkan lebih dominan diproduksi melalui kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) serta praktik pedagogis eksklusif di ruang kelas. Jika tidak dikelola dengan prinsip inklusivitas yang ketat, integrasi nilai religius dalam PKn justru berisiko menciptakan sekat identitas yang melemahkan kohesi sosial peserta didik serta menghambat pencapaian nilai kebinekaan global di tingkat implementasi. Fenomena ini

menegaskan bahwa tantangan utama PKn bukan sekadar masalah teknis instruksional, melainkan pemulihan rasionalitas kewargaan di tengah kuatnya tarikan politik identitas.

Sebagai langkah solutif, penelitian ini menyarankan perlunya reposisi kebijakan kurikulum nasional melalui perumusan standar literasi lintas agama (interfaith literacy) sebagai kompetensi wajib bagi setiap pendidik PKn. Untuk pengembangan ilmu ke depan, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi eksperimental guna menguji efektivitas model pembelajaran berbasis dialog antar-iman secara langsung. Pendekatan empiris tersebut sangat mendesak untuk diterapkan pada satuan pendidikan yang memiliki kerentanan intoleransi tinggi, demi mereduksi polarisasi dan mengembalikan khittah PKn sebagai perkat kohesi sosial.

REFERENCES

- Al Humaidy, M. A., Wahyuningrum, S. R., Mariyam, S., & Mubarak, R. (2026). *Toleransi dan Sosial Sumenep*. UIN Madura Press.
- Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(1), 404–423.
- Chris, O. I. (2025). Religion and Nigerian Politics: Impact and prospects for sustainable political development. *Religion*, 1(1).
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Haluti, F., Judijanto, L., Apriyanto, A., Hamadi, H. H., Bawa, D. L., & Kalip, K. (2025). *Moderasi Beragama: Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hatim, M., Irfan, A., & Sikandar, M. (2025). Emerging Trends of Radicalization among Youth: Case Study of Educational Institutions. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(2), 1455–1463.
- Hidayat, D. (2024). *Moderasi Beragama untuk Kehidupan*. Penerbit Adab.
- Jurs, P., Snebaha, I., Judrupa, I., Liepa-Hazeleja, E., Voronova, I., Kulberga, I., & Zarins, G. (2026). Differences in the Civic Identity of Youth—On the Way to Sustainable Development of Security and Peace. *Education Sciences*, 16(3), 443.
- Kholil, S., Ismail, I., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Strengthening Religious Moderation through PTKIN and SIT Collaboration to Build

- Social Harmony. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 9(2), 228–236.
- Kusnadi, K. (2024). Filantropi berbasis pendidikan kewarganegaraan: Pembelajaran untuk memperkuat karakter kepedulian sosial warga negara. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2).
- Kymlicka, W. (2022). Multiculturalism as citizenization: Past and future. In *Assessing Multiculturalism in Global Comparative Perspective* (pp. 21–40). Routledge.
- Maharani, S. P., Tsuraya, F. G., Azzahra, N., & Faizin, A. (2026). Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Global Education Based on Spirituality and Religious Moderation. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 114–134.
- Mali, E. L., & SH, M. H. (2026). *BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Goresan Pena.
- Marsudi, K. E. R. (2020). Analisis Isi Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Kurikulum 2013. *Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad, 21*, 68.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Puspitasari, D., & Rohmah, U. (2025). Penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Membangun Karakter Kebhinekaan Global pada Anak Usia Dini. *Journal of Early Childhood and Character Education*, 5(1), 49–64.
- Samsuri, S. (2026). The competency-based good citizens in Indonesia's civic education policy. *Journal of Moral Education*, 1–21.
- Saragih, K. W., Suhendar, A., Damanik, J., Girsang, R. N., Saragi, S. R., & Ningrum, W. C. (2025). Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 208–218.
- Suhendar, A., & Halimi, M. (2023). The Role of Anti-Bullying Change Agents in Shaping Civic Dispositions to Tackle Bullying Behavior. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 2, 903–913.
- Suhendar, A., Ridayani, Azis, D., Mohd Yusoff, M. Z., & Rini Utami, A. (2024). Optimizing citizenship education for ecological awareness: Analysis of the effectiveness of the lihat sampah ambil (LISA) program in environmental conservation. *Journal of Professional Learning and Sustainable Education*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.62568/jplse.v1i1.50>
- Suhendar, A., Saragih, K. W., Bakri, A., & Hikmah, N. (2026). POLARISASI POLITIK DALAM ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN BIBLIOMETRIK ETIKA KOMUNIKASI

POLITIK DAN RELEVANSI SIYASAH SYAR'IYYAH. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 25–38.

Syaifulloh, M. (2025). Pengembangan Model Standar Mutu Literasi Sains Berbasis Moodle Dalam Pembelajaran Ipa Dengan Pendekatan R&D Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Smp. *Aneka Metode Penelitian Pendidikan Di Sekolah*, 93.

Syam, A. M., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Islamic Philosophy: A Comparative Perspective Between Ibnu Khaldun And Karl Marx. *SYAHADAT: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 55–72.

Ukur, J., Suhendar, A., Sirait, I. R., Ababbil, T. N., & Anshari, N. N. (2025). STRENGTHENING DIGITAL-BASED CIVICS EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS AT SMK PRAMA ARTHA SERBELAWAN. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 488–498.